

# TESIS

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Di Pasca  
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



**Komisi Pembimbing:**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H. (Ketua Pembimbing)**

**Dr. Yasniwati, S.H.,M.H. (Anggota Pembimbing)**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

# **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(Brian Hariadi, 2020123052, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022)**

## **ABSTRAK**

Dalam melakukan kegiatannya, pengusaha pertambangan sering menyewa alat berat berupa excavator dari pengusaha lain. Sering terjadi bahwa barang yang disewa digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, yang berakibat pada barang yang disewa itu berada dalam sitaan sebagai barang bukti. Akibatnya, pengusaha yang menyewakan mengalami kerugian ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak penyewa dalam keadaan seperti itu. Untuk menjawab itu perlu dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengajukan 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu (1) untuk meneliti penyebab terjadinya penyitaan alat berat oleh penegak hukum; (2) untuk meneliti akibat hukum penyitaan terhadap pihak ketiga yang menyewakan alat berat; dan (3) untuk meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan alat berat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, penyebab terjadinya penyitaan adalah agar penyidik memiliki bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Kedua, akibat hukum penyitaan pada pihak ketiga tidak mampu menggunakan alat beratnya untuk menghasilkan pendapatan yang berakibat pada kemacetan pembayaran kreditnya yang digunakan untuk membeli barang yang disita. Ketiga, pihak ketiga dilindungi secara hukum oleh Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR, dimana pihak ketiga berhak melakukan upaya perlawanan (*derden verzet*) sebelum perkara diputus.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Menyewa Alat Berat, Perbuatan Melawan Hukum**

***LEGAL CONSEQUENCES OF RENTAL AGREEMENTS TO RENT HEAVY EQUIPMENT USED TO COMMIT ACTS AGAINST THE LAW***

***(Brian Hariadi, 2020123052, Master Of Notary Study Program, Faculty Of Law, Andalas University, 2022)***

***ABSTRACT***

During activities, mining entrepreneurs often rent heavy equipment in the form of excavators from other entrepreneurs. It often happens that rented items are used to commit crimes, which leads to the confiscation of rented items as evidence. Therefore, renting entrepreneurs will suffer economic losses. This raises the legal question of how to protect tenants in this case. To answer this question, we need to do a study. This study is a normative legal study, which raises three (three) legal issues, namely (1) examining the reasons for the confiscated heavy equipment by law enforcement departments; (2) examining the legal consequences of confiscated on third parties renting heavy equipment; and (3) examining the forms of legal protection for third parties renting heavy equipment. The study shows that, first of all, the reason for the confiscation is to let investigators have evidence of the crime. Secondly, the legal consequence of confiscation on third parties is the inability to use their heavy equipment to earn income, resulting in delayed payment of credit for the purchase of confiscated goods. Third, the third party is protected by the laws of Article 206, Article 227-228 R.Bg and Article 195 (6) HIR. The third party has the right to make resistance efforts (*derden verzet*) before the case is adjudicated.

***Kata Kunci: Legal Consequences, Rental Agreements, Commit Acts Against The Law***